



Implementasi Penggunaan Akun sesuai dengan Bagan Akun Standar



www.perbendaharaan.go.id

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAAN



Dasar Hukum

1. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. PMK 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
3. Kepdirjen Perbendaharaan Nomor Kep-311/PB/2014 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

ISI STRUKTUR BAS



No	KLASIFIKASI	DIGIT	PENJELASAN	ATRIBUT PELAPORAN
1	SATKER	6	Kode satker	BA, Eselon1, Konsolidasi Satker
2	KPPN	3	Kode KPPN	Kode Kanwil Ditjen Perbendaharaan
3	AKUN	6	Kode Akun	
4	PROGRAM	3+2+2	Kode BA, Eselon I, Program	
5	OUTPUT	4+3	Kode Kegiatan, Output	Kegiatan, Fungsi, Subfungsi, Satuan
6	DANA	1+1+8	Kode Sumber Dana, Cara Tarik, No. Register	No Register
7	Bank	1+4	Kode Tipe Rekening, No. Rekening, Bank	Kode KPPN
8	Kewenangan	1	Kode Kewenangan	
9	Lokasi	2+2	Kode Propinsi, Kab/Kota	
10	Tipe Anggaran	1	Kode Tipe Anggaran	
11	Antar entitas	6	Kode Antar Entitas	
12	Cadangan	6	Kode Cadangan	Belum digunakan
Jumlah (minus cadangan)		56		

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAAN



POIN-POIN PERUBAHAN TAHUN 2015

- 1) PEMBEDAAN AKUN AKRUAL DAN AKUN KAS
(beberapa dengan kodefikasi yg sama namun uraian yang berbeda)
- 2) AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN SESUAI
DENGAN KODEFIKASI AKUN PERSEDIAAN DI
NERACA
- 3) PEMISAHAN AKUN PENGEMBALIAN BELANJA
TAYL
- 4) PENAMBAHAN BEBERAPA AKUN PENDAPATAN,
BELANJA, PERBAIKAN URAIAN, DAN
PENJELASAN

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAAN



Kerangka Segmen Akun

Akun Akrua

- Aset
- Kewajiban
- Ekuitas
- Pendapatan-LO
- Beban (kecuali 53, 5218)

Akun Kas

- Kas Setara Kas
- Utang PFK
- SAL
- Pendapatan-LRA (kecuali 49)
- Belanja (kecuali 59)
- Transfer ke Daerah & Dana Desa
- Pembiayaan
- Transitoris



SEGMENT AKUN KAS DAN UPDATENYA



www.perbendaharaan.go.id

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAAN



51 - BELANJA PEGAWAI

Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran kepada pekerja yang dipekerjakan sendiri, dan pekerja lain yang bukan karyawan pemerintah tidak termasuk dalam kelompok belanja pegawai tetapi dalam kelompok belanja barang dan jasa.



HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TERKAIT BELANJA PEGAWAI

- a. Belanja Pegawai difokuskan untuk membayar gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji, honor-honor pegawai non PNS serta tunjangan-tunjangan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- b. Sementara itu, sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor-honor untuk pelaksana kegiatan yang semula disediakan dari *“Belanja Pegawai : Uang honor tidak tetap”* diintegrasikan ke dalam kegiatan induknya dan kode akun yang digunakan mengikuti jenis belanja kegiatan yang bersangkutan.



AKUN BELANJA TUNJANGAN TENAGA PENDIDIK & TENAGA PENYULUH NON PNS

Berdasarkan hasil review BPKP terhadap Belanja Bantuan Sosial, terdapat pembayaran yang tidak tepat dialokasikan pada belanja bansos pada Kemenag dan Kemendikbud. Alokasi Belanja untuk pembayaran gaji/tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Non PNS yang sebelumnya dibayar menggunakan akun Belanja Bantuan Sosial diubah menjadi Belanja Pegawai sbb:

Kode Akun	Uraian	Keterangan
511	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	-
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	-
51152	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Non PNS	Kode Akun & Uraian Akun Baru
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	
511522	Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAAN

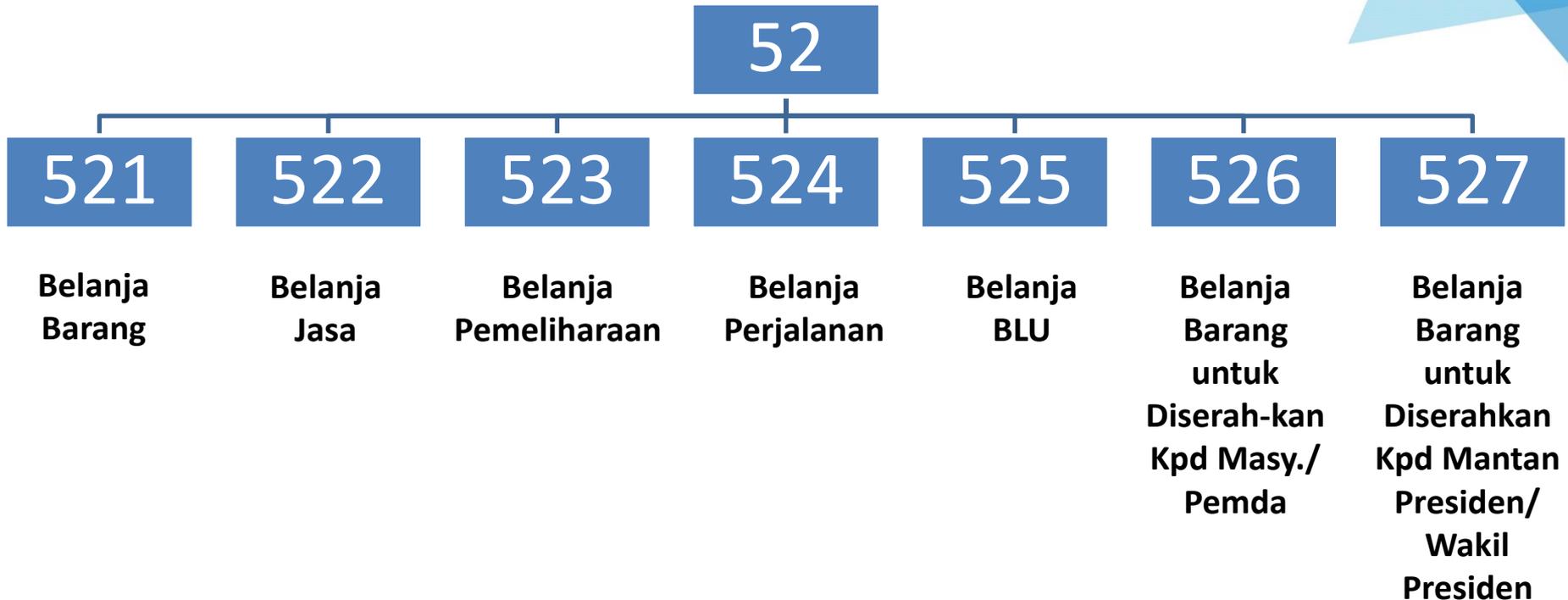


BELANJA BARANG

Pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, Barang dan Jasa yang digunakan untuk riset dan pengembangan, pelatihan staf, riset pasar termasuk.

- **ATK dan operasional kantor lainnya;**
- **Biaya pemeliharaan;**
- **Biaya perjalanan;**
- **Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat.**

Struktur Belanja Barang



INTEGRITAS

PROFESIONALISME

SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAAN



HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TERKAIT BELANJA BARANG (1)

- a. Belanja Barang difokuskan untuk membiayai kebutuhan operasional kantor (barang dan jasa), pemeliharaan kantor dan aset tetap lainnya serta biaya perjalanan.
- b. Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk pembayaran honor-honor bagi para pengelola anggaran (KPA, PPK, Bendahara dan Pejabat Penguji/ Penandatanganan SPM, termasuk Petugas SAI/ SIMAK-BMN).
- c. Selanjutnya sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor untuk para pelaksana kegiatan menjadi satu kesatuan dengan kegiatan induknya.



HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TERKAIT BELANJA BARANG (2)

- d. Selain itu, Belanja Barang juga meliputi hal-hal :
- Pengadaan Aset Tetap yang nilai persatuannya di bawah nilai minimum kapitalisasi (< Rp300.000,-/unit);
 - Belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak menambah umur ekonomis, manfaat atau kapasitas;
 - Belanja perjalanan dalam rangka perolehan barang pakai habis.
- e. Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk kegiatan operasional Satker BLU (gaji dan operasional pelayanan Satker BLU).



AKUN BELANJA PERSEDIAAN

Kaba persediaan – pendekatan aset:

Belanja barang yg menghasilkan persediaan
DICATAT SESUAI DENGAN JENIS AKUN
PERSEDIAANNYA

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAAN

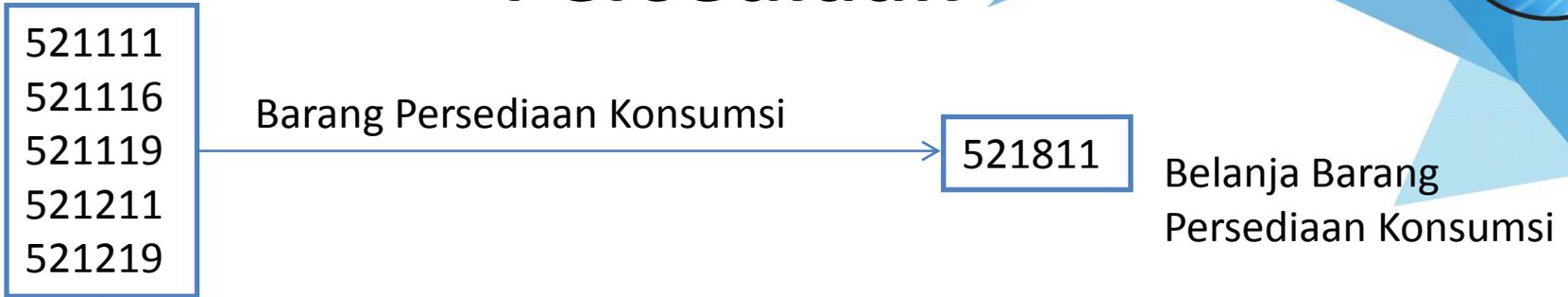
PENGELOMPOKAN AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN



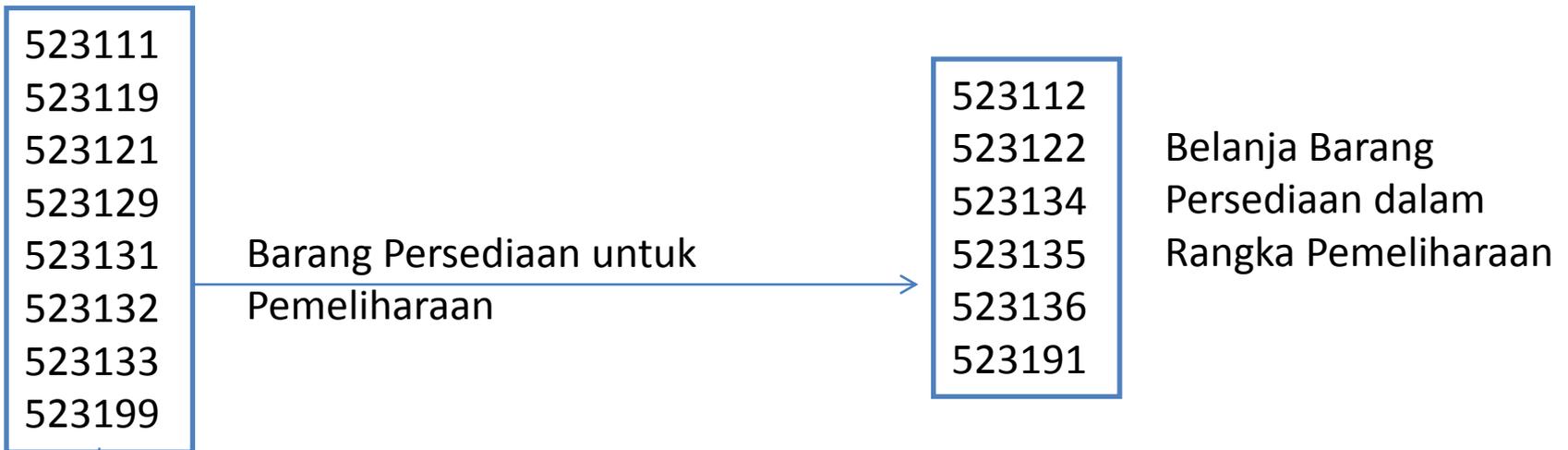
Secara garis besar Belanja yang menghasilkan persediaan dikelompokkan dalam kategori sbb:

1. Belanja Barang Persediaan dalam Rangka Operasional;
2. Belanja Barang Persediaan dalam Rangka Pemeliharaan;
3. Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda;
4. Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang.

Contoh perubahan Akun terkait Persediaan



Tidak menghasilkan barang persediaan,
Tetap di akun dimaksud



Tidak menghasilkan barang persediaan,
Tetap di akun dimaksud

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAAN



SUSUNAN AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN PADA SEGMENT AKUN (1)

BELANJA BARANG PERSEDIAAN

5218 Belanja Barang Persediaan

52181 Belanja Barang untuk Persediaan

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

521812 Belanja Barang Persediaan Amunisi

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan
Leges

52182 Belanja Barang Persediaan untuk proses produksi

521821 Belanja Barang Persediaan bahan baku

521822 Belanja Barang Persediaan barang dalam proses

52183 Belanja Barang Persediaan Bahan Lainnya

521831 Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/
berjaga-jaga

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAAN



SUSUNAN AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN PADA SEGMENT AKUN (2)

BELANJA BARANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA PEMELIHARAAN (1)

- 5231 Belanja Pemeliharaan
 - 52311 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
 - 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
 - 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**
 - 52312 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
 - 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
 - 523122 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina**
 - 523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**

SUSUNAN AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN PADA SEGMENT AKUN (3)



BELANJA BARANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA PEMELIHARAAN (2)

- 52313 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - 523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - 523132 Belanja Pemeliharaan Irigasi
 - 523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan
 - 523134 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**
 - 523135 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi**
 - 523136 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan**
- 52319 Belanja Pemeliharaan Lainnya
 - 523191 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya**
 - 523199 Belanja Pemeliharaan Lainnya

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAAN



SUSUNAN AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN PADA SEGMENT AKUN (4)

BELANJA BARANG PERSEDIAAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA (1)

- 526 BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA
MASYARAKAT/ PEMDA
 - 5261 Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/
Pemda
 - 52611 Belanja Barang untuk diserahkan kepada
masyarakat/ Pemda
 - 526111 Belanja Tanah Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pemda
 - 526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk
Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
 - 526113 Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk
Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
 - 526114 Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan
Untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda
 - 526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk
Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda





SUSUNAN AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN PADA SEGMENT AKUN (5)

BELANJA BARANG PERSEDIAAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA (2)

- 5262 Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah
 - 52621 Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah
 - 526211 Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
 - 526212 Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
- 5263 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
 - 52631 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
 - 526311 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

2

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAAN



526 - BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA

(1/2)

Sebelumnya jenis alokasi yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda menggunakan akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya), sehingga tidak nampak informasi modal/investasi pemerintah yang diberikan kepada publik.

Dengan adanya kelompok akun 526, maka terinformasikan bahwa terdapat pengalihan berupa modal/investasi dari pemerintah pusat kepada masyarakat/pemda dalam kerangka mendukung arah kebijakan fiskal pemerintah.

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAAN

SUSUNAN AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN PADA SEGMENT AKUN (6)



BELANJA BARANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA BANTUAN SOSIAL (1)

57 BELANJA BANTUAN SOSIAL

571 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITASI SOSIAL

5711 Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial

57111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial

571111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial
Dalam Bentuk Uang

**571112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial
Dalam Bentuk Barang/Jasa**

572 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMINAN SOSIAL

5721 Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial

57211 Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial

572111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial
Dalam Bentuk Uang

**572112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial
Dalam Bentuk Barang/Jasa**

2

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAAN

SUSUNAN AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN PADA SEGMENT AKUN (7)



BELANJA BARANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA BANTUAN SOSIAL (2)

573 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN SOSIAL

5731 Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial

57311 Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial

573111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang

573112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa

574 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL

5741 Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial

57411 Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial

574111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang

574112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa

?

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAAN



SUSUNAN AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN PADA SEGMENT AKUN (8)

BELANJA BARANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA BANTUAN SOSIAL (3)

- 575 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 - 5751 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan
 - 57511 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan
 - 575111 Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang
 - 575112 Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa**
- 576 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA
 - 5761 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana
 - 57611 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana
 - 576111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang
 - 576112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Barang/Jasa**

2

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAAN



POSTING RULES DALAM SAIBA (1)

1. Akun Belanja yang menghasilkan Persediaan dicatat menggunakan pendekatan aset, yaitu pada saat terjadi realisasi belanja dengan menggunakan akun tersebut di atas, maka akan timbul aset berupa persediaan.
2. Akun Belanja Barang yang menghasilkan persediaan hanya dicatat dalam buku besar kas, sementara di buku besar akrual akan dicatat adanya persediaan.
3. Atas penggunaan persediaan akan dicatat sebagai beban pada Buku Besar Akrual pada akhir periode.

POSTING RULES DALAM SAIBA (2)



PADA SAAT TERJADI REALISASI BELANJA BARANG PERSEDIAAN

BUKU BESAR KAS			BUKU BESAR AKRUAL		
D 5218XX*	Belanja Barang Persediaan	XXX	D 117911	Persediaan Belum Diregister	XXX
K 115611	Piutang dari KUN	XXX	K 313111	DKEL	XXX

LRA

NERACA

Posting Rules yang sama untuk akun 523XXX, 526XXX, 527XXX, 57XXX2

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAAN

POSTING RULES DALAM SAIBA (3)



PADA SAAT SAIBA MENERIMA KIRIMAN DATA DARI SIMAK BMN

BUKU BESAR KAS			BUKU BESAR AKRUAL		
	No Entry		D 117XXX	Persediaan	XXX
			K 117911	Persediaan Belum Diregister	XXX

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAAN

POSTING RULES DALAM SAIBA (4)



PADA SAAT PENYESUAIAN BEBAN PERSEDIAAN PADA AKHIR PERIODE PELAPORAN

BUKU BESAR KAS			BUKU BESAR AKRUAL		
	No Entry		D 593XXX	Beban Persediaan	XXX*
			K 117XXX	Persediaan	XXX

LO

*Besaran Beban Persediaan dihitung dari:

Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian + Transfer Masuk - Transfer Keluar + Hibah Masuk - Hibah Keluar - Saldo Akhir



POSTING RULES DALAM SAIBA (4)

POS-POS AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL

KODE AKUN	POS LO
5218XX	BEBAN PERSEDIAAN
523XXX	BEBAN PEMELIHARAAN
526XXX	BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/ PEMDA
57XXX2	BEBAN BANTUAN SOSIAL

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAAN

CONTOH LAPORAN OPERASIONAL



POS-POS AKUN BELANJA PERSEDIAAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL

POS BEBAN OPERASIONAL	20X1	20X0
Beban Pegawai	XXX	XXX
Beban Persediaan	XXX	XXX
Beban Jasa	XXX	XXX
Beban Pemeliharaan	XXX	XXX
Beban Perjalanan	XXX	XXX
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	XXX	XXX
Beban Bunga	XXX	XXX
Beban Subsidi		
Beban Hibah		
Beban Bantuan Sosial	XXX	XXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi	XXX	XXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	XXX	XXX
Beban Transfer	XXX	XXX

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAAN

Mana yang masuk Persediaan (Surat Direktur APK Nomor S-6478/PB.6/2015)



1. Persediaan tidak dapat dilihat dari bentuk barangnya, melainkan niat awal (*intention*) pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan penyusunan RKAKL-nya, sehingga untuk barang-barang yang memang direncanakan habis pada satu kegiatan tidak dialokasikan dari Belanja Barang Persediaan dan tidak menjadi persediaan. Suatu barang dapat digolongkan sebagai barang persediaan apabila perencanaan pengadaan barang tersebut bersifat kontinu atau berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kali kegiatan saja.
2. Suatu barang dapat dikategorikan sebagai persediaan bukan terbatas hanya pada satu Output Layanan Perkantoran saja, namun bisa terdapat pada output lain sepanjang memenuhi kriteria tersebut di atas.

Mana yang masuk Persediaan (Surat Direktur APK Nomor S-6478/PB.6/2015)



Uraian	Klasifikasi	Keterangan
Pengadaan seminar kit untuk peserta diklat oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang dapat dipakai untuk beberapa kali kegiatan diklat.	Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811)	<ul style="list-style-type: none">- perencanaan pengadaan secara kontinu/ berkelanjutan- tidak habis dalam sekali kegiatan diklat
Pengadaan seminar kit untuk kegiatan Sosialisasi Aplikasi SAIBA oleh KPPN Jakarta II.	Belanja Bahan (521211)	<ul style="list-style-type: none">- perencanaan pengadaan hanya untuk satu kali kegiatan saja- habis dalam sekali kegiatan sosialisasi
Pengadaan perlengkapan gedung seperti engsel pintu, kunci, lampu, dll untuk pemeliharaan gedung kantor oleh KPPN Klaten.	Belanja Barang Persediaan untuk Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523112)	<ul style="list-style-type: none">- tidak habis dalam sekali pakai, sifatnya cadangan atau berjaga-jaga
Service rutin dan ganti oli untuk kendaraan dinas di bengkel resmi oleh Sekretariat Ditjen SDPPI.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121)	<ul style="list-style-type: none">- habis dalam sekali pakai
Pembelian oli pelumas dan BBM untuk peralatan genset oleh pengelola Gedung Keuangan Negara.	Belanja Barang Persediaan untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523123)	<ul style="list-style-type: none">- tidak habis dalam sekali pakai, sifatnya cadangan atau berjaga-jaga



IMPLIKASI PERUBAHAN AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN TERHADAP PELAKSAAN ANGGARAN

1. Perlu dilakukan revisi POK atas DIPA Satker.
2. Aplikasi RKAKL telah dilakukan update;
3. Peraturan mengenai revisi anggaran T.A. 2015 dapat mempedomani PMK 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran T.A 2015.

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAAN



Akun Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- 52411**1** Belanja Perjalanan Biasa
- 52411**2** Belanja Perjalanan Tetap
- 52411**3** Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
- 52411**4** Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
- 52411**9** Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAAN



Penggunaan Akun Perjadin DN

Perjadin **tidak** dengan mengadakan/**tidak** untuk menghadiri "Meeting"

- 524111 (Luar Kota)
- 524112 (tetap)
- 524113 (Dalam Kota)

Perjadin dengan mengadakan/untuk menghadiri "Meeting"

- 524114 (Dalam Kota)
- 524119 (Luar Kota)

Meeting: Rapat, Seminar dan sejenisnya

Akun Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Perjadiin jabatan melewati batas kota

524111

Perjadiin pindah

Perjadiin Yg Dilaksanakan di dalam kota

524113

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. pengumandahan (Detasering);
- c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- d. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- g. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- h. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.



524112 – Belanja perjalanan tetap

Pengeluaran untuk Perjadin tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjadin.

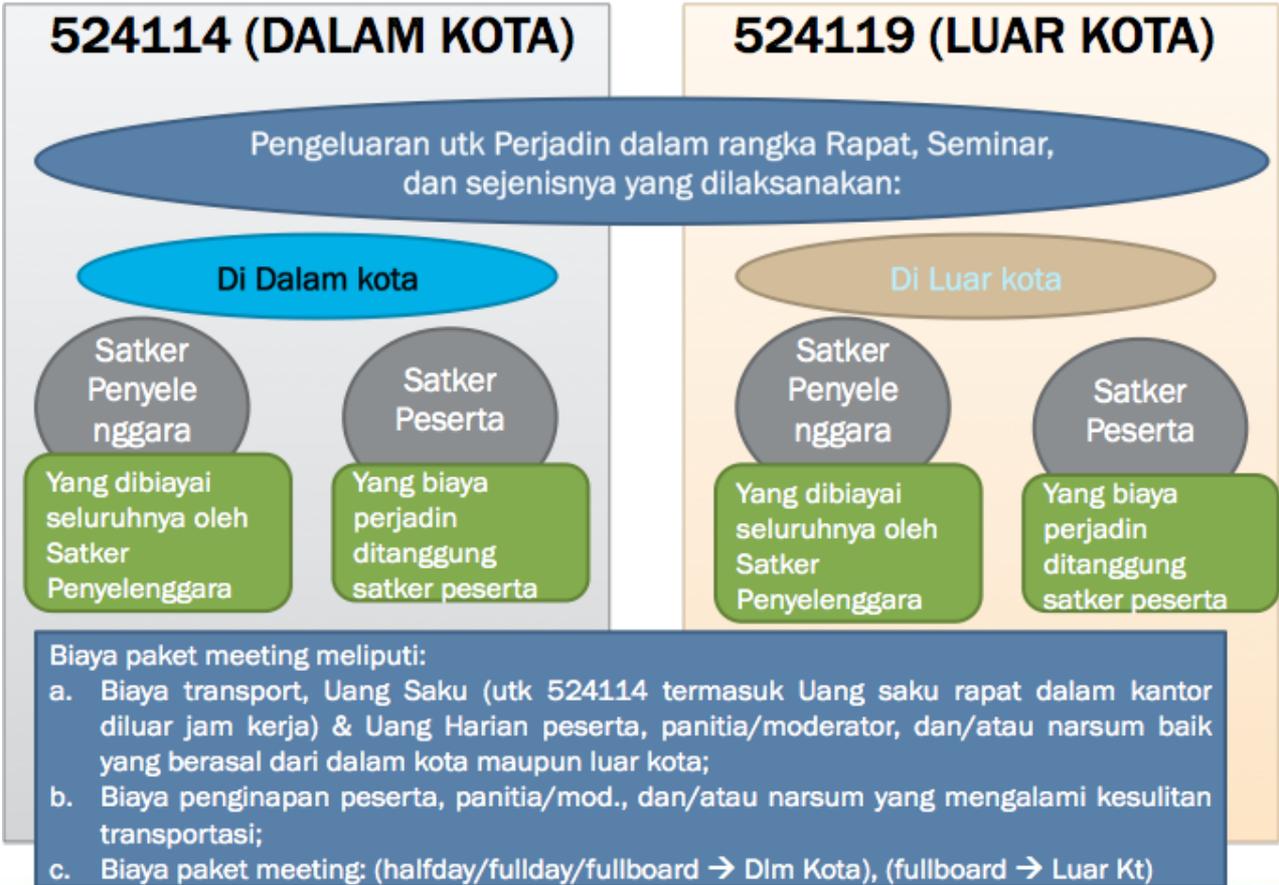
Pengeluaran oleh K/L untuk kegiatan pelayanan masyarakat.

Contoh:

Perjalanan Dinas oleh:

- Tenaga penyuluh pertanian;
- Juru penerang;
- Penyuluh agama;
- Dan lainnya.

paket meeting



Ilustrasi Penggunaan Akun 524114 dan 524119

No.	Jenis Kegiatan	Kode akun	Keterangan
1.	Yang dilaksanakan di dalam kantor (di luar jam kerja) Satker Penyelenggara		
	a. Uang saku rapat	524114	
	b. Biaya konsumsi rapat	521111/521211	
	c. Uang Transpor pegawai	524114	
2.	Yang dilaksanakan di luar kantor dan di dalam kota Satker Penyelenggara		
	a. Uang Saku Rapat Paket <i>Halfday/Fullday/Fullboard</i>	524114	Untuk peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber
	b. Uang Harian	524114	
	c. Uang Transpor pegawai		
	i. Melewati batas kota/luar kota	524114	
	ii. Dalam kota	524114	
	d. Biaya Penginapan		
	i. Melewati batas kota/luar kota	524114	
	ii. Dalam kota (lebih dari 8 jam)	524114	
	e. Biaya paket meeting <i>Halfday/Fullday/Fullboard</i>	524114	
3.	Yang dilaksanakan di luar kota Satker Penyelenggara		
	a. Uang saku Paket <i>Fullboard</i>		Untuk peserta, panitia/moderator, dan narasumber
	i. Melewati batas kota/luar kota	524119	
	ii. Dalam kota	524119	
	b. Uang Harian	524119	
	c. Uang Transport pegawai		
	i. Melewati batas kota/luar kota	524119	
	ii. Dalam kota	524119	
	d. Biaya Penginapan		
	i. Melewati batas kota/luar kota	524119	
ii. Dalam kota (lebih dari 8 jam)	524119		
e. Biaya paket meeting (<i>fullboard</i>)	524119		



3.3 BELANJA MODAL

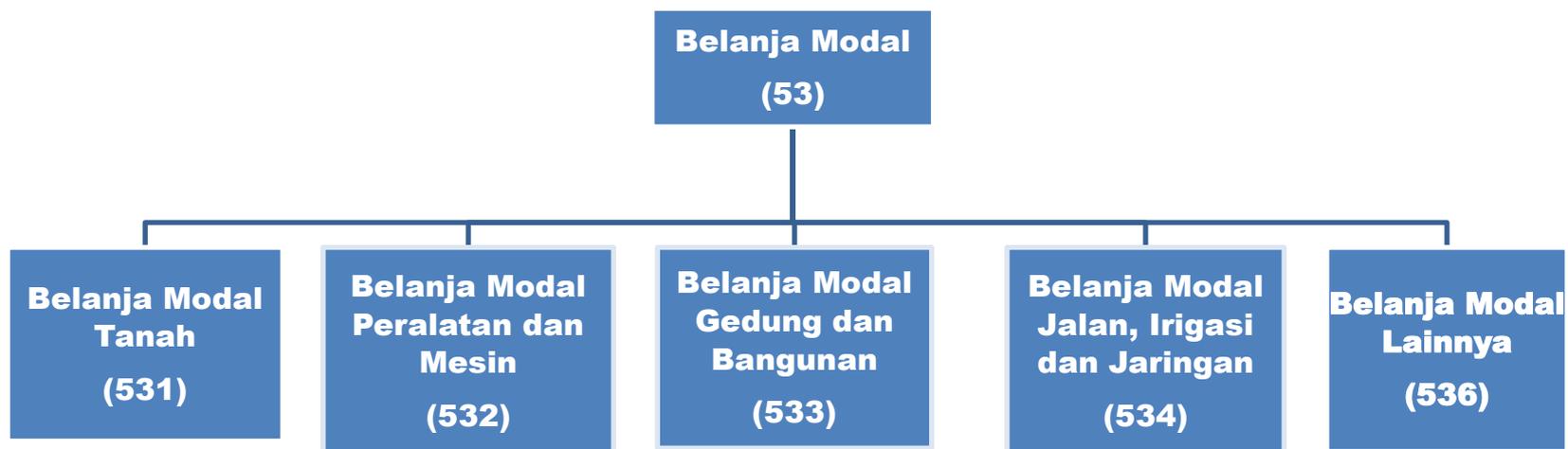
Belanja Modal adalah Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Lainnya diantaranya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).

(Lampiran II PP 71 dan PMK 91/PMK.06/2007)

Struktur Belanja Modal



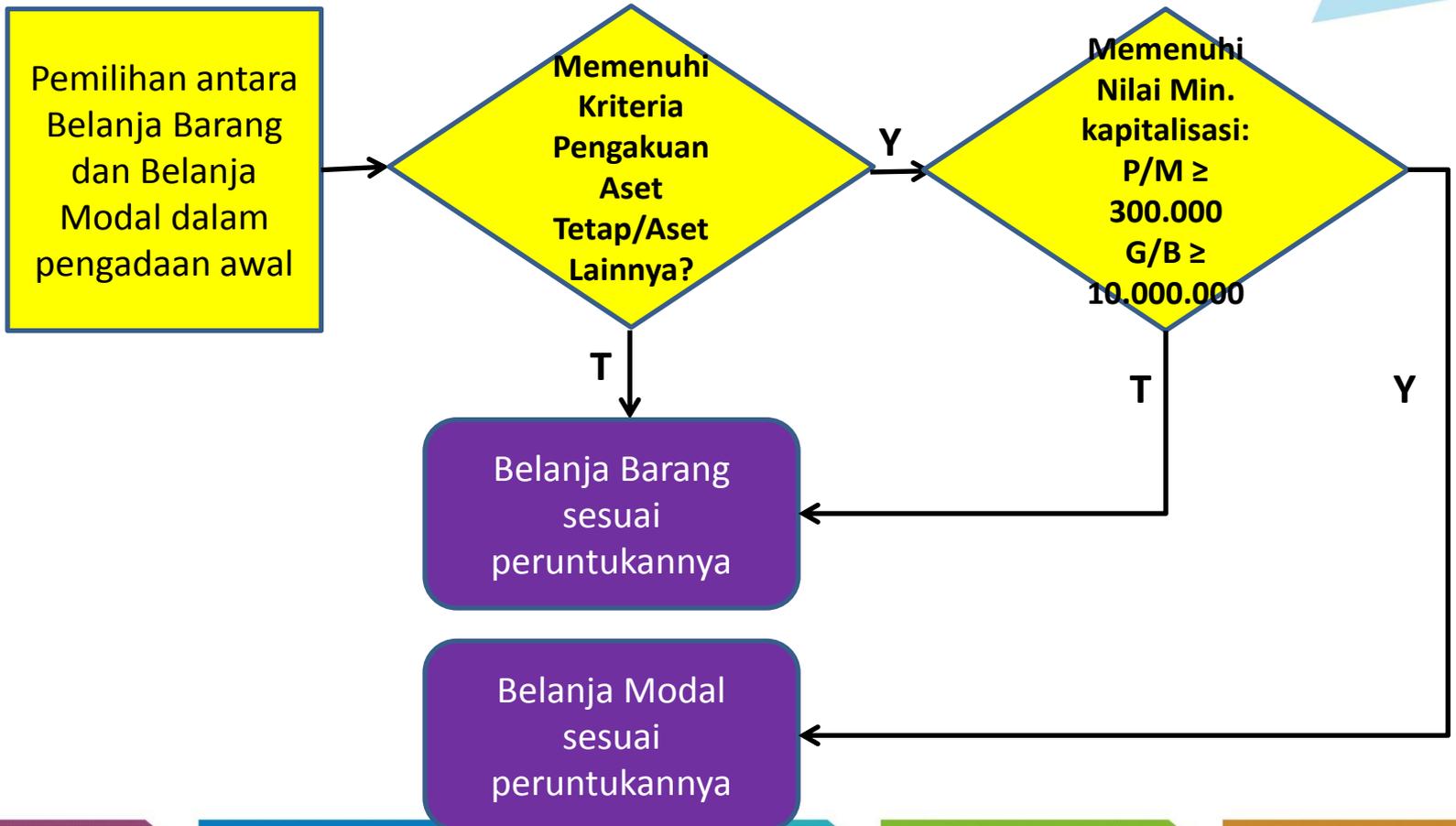


Konsep Nilai Perolehan

- Komponen belanja modal untuk perolehan aset tetap meliputi:
 - Harga beli aset tetap
 - Semua biaya yang dikeluarkan sampai AT siap digunakan, termasuk:
 - * biaya perjalanan dinas;
 - * ongkos angkut;
 - * biaya uji coba;
 - * biaya konsultan.



Belanja Barang atau Belanja Modal?





Definisi Aset Tetap

- Dimiliki dan Berwujud;
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- Digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
- **Memenuhi kriteria nilai satuan minimum kapitalisasi.**

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAAN



Kriteria Pengakuan Aset Tetap

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- Biaya perolehan dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAAN

Kriteria Kapitalisasi Setelah Perolehan





Belanja Bantuan Sosial

- Bantuan Sosial merupakan Pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

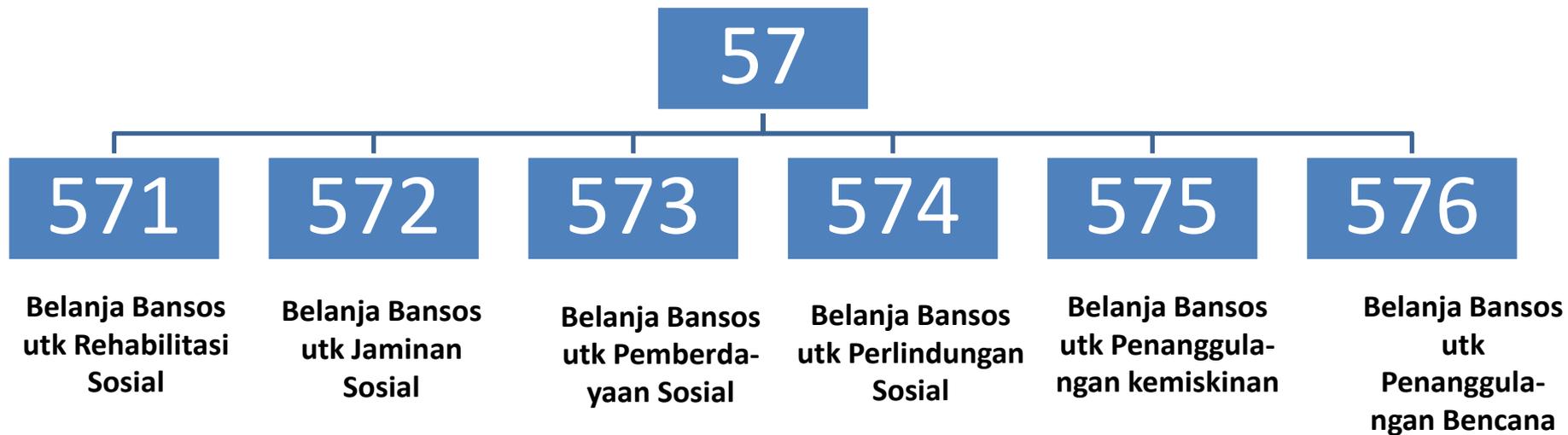
SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAAN

Klasifikasi Belanja Bantuan Sosial

- Belanja bantuan sosial dipisahkan berdasarkan jenis kegiatannya sesuai dengan Bultek 10 SAP tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial.



PENGEMBALIAN BELANJA TAYL



- Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu diakui sebagai pendapatan periode berjalan, dan dicatat menggunakan akun:

Kode Akun	Uraian	Keterangan
4239	Pendapatan Lain-lain	Kode Akun & Uraian Akun Lama
42395	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	
423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	
423954	Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang TAYL	
423955	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi TAYL	
423956	Penerimaan Kembali Belanja Hibah TAYL	
423957	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial TAYL	
423958	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL	
423959	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa TAYL	

Sebagai alat kontrol dengan pengurangan nilai Aset di Neraca



Thank You !



www.perbendaharaan.go.id

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAAN